

BAB V

PEMBAHASAN

Di bab ini pembahasan dengan menganalisis dan mengkritisi bagaimana pergumulan politik ini diejawantahkan pada persoalan kebijakan pendidikan kemudian berproses pada dinamika politik internal dan kontestasi ideologi keagamaan yang berdampak pada pendidikan di MA sekaligus melakukan strategi dan upaya dalam mengembangkan pendidikan pesantren, madrasah dan sekolah.

A. Surviving In Changing Times

MA berusaha bertahan dan berkembang dalam perubahan zaman dengan terus mengembangkan keterampilan adaptasi dan fleksibilitas, hal yang penting untuk bertahan dalam perubahan zaman harus belajar dengan hal-hal baru, berubah dengan cepat, dan menghadapi tantangan baru dengan sikap terbuka, sekalipun pengaruh politik dan kekuasaan dalam membentuk sistem pendidikan suatu negara atau wilayah, yang mencakup pengambilan keputusan politik dalam menentukan sistem pendidikan dan MA dengan pendidikan Islam yang diimplementasikan melalui ideologi keagamaan pada ahlussunah waljama'ah, karena nilai-nilai pendidikan yang ada di ahlussunah waljama'ah, tetap diwujudkan dalam kehidupan sosial, tanpa terkecuali dalam konteks pembentukan karakter individu dalam lingkungan sosial yang sangat beragam.

Di antara bertahan dalam perubahan zaman, MA memiliki ideologi politik pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan tujuan-tujuan sosial-keagamaan yang ingin dicapai. Pendekatan politik pendidikan di MA didasarkan pada gagasan bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk membentuk karakter dan kepribadian individu

yang baik, serta menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan dapat berkontribusi bagi masyarakat.

MA mengembangkan model pendidikan yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan kurikulum modern untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan masa depan. MA juga memiliki pandangan kritis terhadap sistem pendidikan nasional di Indonesia yang dianggap masih terlalu terfokus pada aspek akademis dan kurang memperhatikan aspek karakter dan moral siswa. Oleh karena itu, organisasi ini mengembangkan kurikulum yang berbasis pada ajaran Islam dan nilai-nilai lokal, serta memperkenalkan berbagai kegiatan dalam pengembangan karakter dan kepribadian yang seimbang.

Secara politik, MA mempromosikan ajaran Islam sebagai basis untuk membangun kesadaran dan kemandirian umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan global. MA juga memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi masyarakat Indonesia dan berupaya untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

5.1 Respon terhadap Isu-isu Sosial

Hadirnya lembaga pendidikan Islam di sektor swasta, khususnya di Banten, merupakan lahirnya dari persaingan positif yang dikelola oleh organisasi keagamaan dimulai sejak berdirinya sampai bertahannya organisasi keagamaan. Hal ini tidak terlepas adanya kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, konsekuensinya organisasi keagamaan mengikuti regulasi pemerintah atau justru menentanginya. Hadirnya MA bersama dengan organisasi nasional dan Islam lainnya, baik SI, Muhammadiyah atau NU melalui ideologi keagamaan mampu merespon pemerintah yang sejak awal, MA sudah bergerak di bidang dakwah,

pendidikan dan sosial, yang dapat memberi energi positif dalam membangun perubahan masyarakat sebagai pelaku perubahan sosial, yakni *stakeholders*.

MA mampu mentransformasikan kembali fungsi lembaga pendidikan yang telah lama menjadi warisan kemudian ditradisikan oleh ulama setempat untuk pencerdasan umat sebagai bukti sah adanya perwujudan transformasi sosial, pendidikan dan keagamaan, sehingga MA terlibat aktif dalam proses perubahan sosial kaum muslimin Indonesia selama satu abad lebih, sejak masa Kolonial, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, tentu ada pemikiran yang melandasi gerakan dan menentukan pergeseran orientasi perubahan identitas gerakannya dari masa ke masa, lantaran akibat dari kebijakan politik pemerintah kolonial, Orla, Orba dan reformasi terhadap lembaga organisasi keagamaan yang bergerak, khususnya di bidang pendidikan.

Sebagai lembaga pendidikan Islam, yang masih merawat paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Oleh karena itu, MA memiliki ideologi keagamaan yang didasarkan pada ajaran Islam yang bersifat moderat, toleran, dan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemakmuran sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan keadilan dan toleransi antar sesama manusia tanpa memandang agama, ras, atau status sosial.

MA juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana dan media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Menes Banten. Pendidikan sebagai media yang mampu bertahan di tengah perubahan, dengan pendidikan kemampuan berpikir kritis menjadi sangat berharga untuk menganalisis situasi, mengevaluasi

informasi yang akan membantu dalam menghadapi tantangan dengan cara yang efektif. Dalam pandangan MA, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap moral yang baik. Oleh karena itu, MA menerapkan sistem pendidikan yang terintegrasi antara pendidikan formal, agama, dan budaya yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang memiliki karakter, kecerdasan, dan kepedulian sosial yang tinggi.

Dengan demikian, ideologi organisasi keagamaan MA sejak awal berdirinya memiliki komitmen dengan tidak berafiliasi ke partai apapun dan manapun, bersikap anti radikalisme dalam mewujudkan kehidupan moderasi beragama yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Pernyataan seperti itu bukan berlebihan, mengingat dalam membina kehidupan yang harmonis antara individu dalam kehidupan sosial yang pluralistik membutuhkan kesadaran akan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam mewujudkan sikap yang berlandaskan paradigmatik untuk menolak segala bentuk radikalisme dan terorisme yang ada.

Hal ini menunjukkan komitmen MA secara komprehensif sebagai salah satu indikator untuk melihat implikasi keagamaan, pola pikir, sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesetiiaannya pada dasar bangsa Indonesia, terutama penerimaannya terhadap keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

5.2 Ideologi Keagamaan dan Lembaga Pendidikan di MA

Sejak awal berdirinya, MA fokus mengembangkan organisasinya lebih kepada keagamaan, pendidikan dan dakwah, sekalipun dicurigai oleh kolonial Belanda, karena dianggap membahayakan, namun MA tetap melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh para ulama, guru dan

mubalig, demi pendidikan sistem madrasah tercapai. MA berpendirian dengan keyakinan dan semangat keagamaan dijadikan sebagai alat untuk memediasi keberlangsungan pendidikan di Banten, apalagi di Mukhtamar I, MA (1936) melalui kepemimpinan Uwes Abubakar banyak sistem madrasah mengalami peningkatan dan kemajuan baik kuantitas atau kualitas sampai tersebar ke luar daerah Banten termasuk Bogor, Karawang Lampung dan Palembang.

Secara kelembagaan dan keorganisasian, MA merupakan lembaga pendidikan yang masyhur dan sudah tersebar ke luar daerah, kemashuran itu lantaran saling tarik menarik dan multiinterpretasi bahwa MA adalah NU, menurut sebagian yang lain MA adalah MA yang berdiri sendiri dan tidak berada di organisasi keduanya. Hal ini kemudian memicu pergumulan politik antar internal organisasi keagamaan sehingga ideologi organisasi yang dikembangkan semakin memanas namun dengan tujuan untuk mengembangkan pendidikan berjalan sesuai dengan visi misi pendidikan Islam.

Dalam rangka mempengaruhi dan melayani aspirasi masyarakat, semangat membangun negeri dengan keterlibatan individu dalam aksi kolektif, dan membangun bentuk-bentuk organisasi keagamaan dengan cara mengembangkan slogan dan bendera masing-masing, sebagai contoh Malnu merupakan organisasi keagamaan yang menjadi irisan MA, tentu saja tidak lagi sejalan karena Malnu menjadi lembaga pendidikan yang komitmen menebarkan haluan *ahlusunah wal jamaah* seperti yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani serta KH Hasyim Asy'ari. Tentunya dengan nafas yang sama yakni ideologi Islam *Ahlusunah wal Jama'ah*. Berbeda jika menghitung usia Malnu dilihat

dari dinamika para pendiri MA tahun 1953 pasca Muktamar NU di Palembang.

Berdasarkan pasca muktamar NU di Palembang, tahun itu menjadi awal mula dualisme antara MA dan NU. Saat itu, salah satu tokoh MA Uwes Abu Bakar tidak sepakat NU keluar dari Masyumi dan ingin MA menjadi bagian dari Masyumi. Sementara tokoh sepuh MA yang mengikuti keputusan Muktamar NU di Palembang tahun 1952 antara lain KH Abdul latief dari Nanggorak, Menes dan KH M. Zunaedi bin KH E. Muhammad, serta ulama lainnya di Pandeglang yang juga alumni Al-Azhar, Mesir tetap melanjutkan komitmen awal yakni mengembangkan lembaga pendidikan Matlalul Anwar dengan nama Malnu (1953) dan berafiliasi dengan organisasi terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU).

Oleh karena itu dengan penggunaan platform yang berbeda, visi misi yang varian tentu saja menjadikan MA sebagai organisasi keagamaan mengalami perselisihan secara internal, sehingga pergerakan MA dalam bidang sosial keagamaan, terutama dalam bidang sosial tidak mengalami perkembangan yang signifikan seperti halnya dalam bidang pendidikan, sebagaimana mengembalikan MA kepada khittahnya melalui ke-MA-annya sebagai landasan dalam rangka menjamin keadilan dalam menyebarkan pendidikan dan dakwahnya.

Oleh karena itu, dalam setiap pemilihan pengurus di acara Muktamar MA, selain memilih pengurus baru, usaha dan ide *briliant* Mas Abdurrahman sering dijadikan rujukan, mulai dari pesan yang dibicarakan yang menjadi cikal bakal MA kedepan, karena memang sejak awal MA berdiri telah mengembangkan sistem pesantren sekaligus mengukuhkan sistem klasikal pada madrasah-madrasah MA yang sudah

ada, yang dimaksudkan dengan pengembangan sistem pesantren ialah kalau sebelumnya pesantren tidak mengadakan sistem kelulusan ujian, maka dalam Mukhtamar ini, diputuskan bahwa santri dinyatakan lulus jika telah menguasai beberapa kitab kuning (kitab-kitab Islam klasik), sedangkan kitab-kitab yang diujikan kepada para santri ialah sembilan kitab pelajaran pesantren yang telah ditentukan oleh Mas Abdurrahman.

Untuk itu, ketegasan prinsip-prinsip Islam tentang ajaran ketauhidan tersebut, bagi Mas Abdurrahman merupakan suatu kewajiban yang paling utama untuk mengembalikan masyarakat ke pangkal ajaran Islam yang benar. Pekerjaan memperbaiki mental masyarakat yang menyelewengkan ajaran Islam ini baik sadar atau pun tidak, dalam pandangan Mas Abdurrahman adalah langkah konkrit dalam memajukan masyarakat Menes Banten yaitu dengan pendidikan. Sebab, tanpa adanya pendidikan, mustahil perubahan sikap mental masyarakat yang jumud seperti ini, sulit diharapkan untuk berubah apalagi dapat mengembangkan masyarakat ke arah yang lebih maju, tujuan pendidikan memanusiaikan manusia dengan mengusir penjajah, dan memberantas ajaran komunis di Menes, Banten.

Kehidupan sosial, agama dan politik di Indonesia sejak tahun 1966 telah mengalami perubahan yang luar biasa. Periode ini disebut era Orde Baru dan era munculnya kekuatan baru yang disebut dengan gerakan 66. Sistem pendidikan nasional pada saat itu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, maka praktik pendidikan tentu saja menekankan jiwa patriotisme, gerakan-gerakan yang tidak bisa dilepaskan dari gerakan sosial, baik sosial ekonomi maupun sosial politik. MA sebagai lembaga pendidikan di Banten menjadi wadah pengembangan Islam *Ahlusunah*

wal Jamaah, dan MA telah melahirkan banyak para pelajar yang berkontribusi penuh untuk agama bangsa dan negara.

Kemudian di Banten pula, bahwa gerakan sosial yang terorganisir yang bertumpu pada modernisasi sistem pendidikan merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk memberdayakan rakyat yang telah lama tertindas dan bangkit sekaligus bertahan terhadap perubahan adalah menjawab tantangan baru munculnya sekularisasi pendidikan oleh pemerintah Belanda lanjut kepada zaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.

Seiring dengan adanya kebijakan pemerintah Orde Baru tentang pendidikan agama, termasuk madrasah, positif dan konstruktif, terutama dalam dua dekade terakhir 1980-an dan 1990-an. Pandangan pemerintah orde baru bahwa madrasah harus dikembangkan dalam konteks pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. MA dengan kebijakan hal seperti ini semakin kuat dalam komitmen, sekalipun pada masa Orde Baru dalam menyelenggarakan pendidikan agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Menanggapi kebijakan pendidikan bersifat sentralistik, sering terjadi kontroversi antara pemerintah pusat dan daerah, hal ini tidak lebih disebabkan urusan politis dalam rangka untuk mencapai tujuan, maka MA dengan perguruan pusat sebagai basis pendidikan agama dan dakwah tetap menjadikan pendidikan sejatinya harus terbebas dari diskriminasi dan pro egaliterian sehingga terbentuk negara yang demokratis.

Oleh karena itu pendidikan Islam dengan pendirian yang dilegalkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang memuat nilai-nilai persamaan, demokratis dan nilai-nilai agama,

sehingga menurut peneliti dengan adanya kebijakan pendidikan dan termuat dalam Undang-Undang sistem pendidikan nasional bahwa lembaga pendidikan Islam yang terbesar di Banten, MA tetap melakukan perbaikan dan pengembangan pendidikan terutama madrasah dan sekolah yang sudah tersebar ke daerah-daerah.

MA secara kelembagaan, sebetulnya di tahun 1970an mengalami pendidikan yang pesat, pada waktu itu partai pro pemerintah lebih banyak mendapatkan fasilitas dari Pemerintah, namun sebagai lembaga Pendidikan yang mandiri tentu saja ingin menjadikan masyarakat lebih mencintai ulama dengan kajian pendidikan Islamnya sehingga menjadi lembaga pendidikan terbesar di Menes dan tersebar karena pendidikan pesantren dan madrasah dan sekolahnya.

Menurut peneliti, dalam melakukan kegiatan pendidikan, MA telah menekankan pada tradisi kepesantrenan, namun mengikuti perkembangan seperti halnya pembelajaran yang diajarkan, baik kurikulum yang diajarkan maupun metode pembelajaran, sehingga ada banyak madrasah-madrasah yang berdiri merupakan cabang dari MA, sehingga keberadaan lembaga pendidikan MA dengan adanya pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah yang masih mempertahankan tradisi keagamaannya, maka dengan sendirinya ada banyak pendidikan MA yang melahirkan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan MA, seperti sekolah dan madrasah di Tangerang dan Cinangka.

Adapun pengelompokan lembaga pendidikan Islam yang dibuat oleh Kementerian Agama, madrasah MA sekarang termasuk madrasah swasta yang modern dan pesantren yang masih mempertahankan nilai-nilai klasikal dengan memberikan materi-materi melalui pembelajaran kitab kuning, hingga akhir 1950-an, MA mengelola semua jenjang

sekolah di Menes, dari tingkat dasar hingga universitas. MA juga mengeluarkan instruksi yang memerintahkan semua madrasah cabang untuk mengubah program enam tahun menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Selain sekolah dan madrasah yang berlangsung, MA juga memperkenalkan sekolah berbasis non-madrasah, atau sekuler, seperti pada tahun 1953, MA menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pembukaan sekolah yang terletak di luar kompleks madrasah utama ini menjadi bukti keseriusan MA untuk memperbaiki sistem pendidikannya yang sudah ada.

Kepemimpinan dari tokoh ke tokoh dalam menjalankan organisasi keagamaan dengan mengemban ideologi yang berasaskan ahlussunnah waljama'ah tentu saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan organisasi khususnya di bidang pendidikan, pemimpin harus mampu mengatasi persoalan-persoalan yang mendatangkan perselisihan yang dapat menimbulkan pemikiran keagamaan yang berbeda, apalagi pimpinan berada pada ranah politik berbeda akibat dari pilihan yang berbeda, namun dikembalikan kepada khittah dan visi misi MA, maka perselisihan pun tidak mengalami hambatan yang berarti. MA terbuka terhadap corak pemikiran yang berbeda karena organisasi MA membawa perubahan dan perkembangan MA kepada kemajuan pendidikan, khususnya di Banten.

Dengan demikian organisasi keagamaan MA memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, terdiri dari berbagai macam lembaga dan bagian-bagian yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pendidikan dan dakwah. Berikut adalah beberapa lembaga yang terdapat dalam organisasi keagamaan MA, diantaranya:

Pertama. Lembaga Pendidikan. Lembaga ini bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan di MA, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Lembaga pendidikan di MA juga melibatkan guru-guru yang berkualitas dan berpengalaman dalam mengajar. *Kedua.* Lembaga Dakwah. Lembaga ini bertugas untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar, mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Lembaga dakwah di Mathla'ul Anwar mengutamakan metode yang santun dan persuasif dalam menyampaikan dakwah.

Ketiga. lembaga Penerbitan dengan PB MA. Lembaga ini bertanggung jawab dalam publikasi buku-buku dan materi-materi ajar yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan dakwah. Lembaga penerbitan di MA juga menerbitkan majalah dan bulletin sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan di dalam dan di luar Mathla'ul Anwar. *Keempat.* Lembaga Kesehatan dengan MA Care, Lembaga ini bertanggung jawab dalam pengelolaan kesehatan di Mathla'ul Anwar. Lembaga kesehatan di Mathla'ul Anwar menyediakan fasilitas kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan bagi siswa, karyawan, dan masyarakat sekitar.

Kelima. Lembaga Pengabdian Masyarakat. Lembaga ini bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelaksanaan program-program pengabdian masyarakat, seperti pengembangan pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan program-program sosial lainnya. *Keenam.* Lembaga Keuangan: Lembaga ini bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan di MA, termasuk pengelolaan dana yang diperoleh dari donatur dan sumbangan dari masyarakat.

Dalam organisasi keagamaan Mathla'ul Anwar, setiap lembaga bekerja secara terintegrasi dan saling mendukung dari setiap sektor

untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

B. Pendidikan Islam di Mathla'ul Anwar sebagai Arena Pergumulan Politik dan Ideologi Keagamaan

Pendidikan Islam di Mathla'ul Anwar dapat dianggap sebagai arena pergumulan politik dan ideologi keagamaan, mengingat institusi pendidikan sering menjadi tempat di mana nilai-nilai, keyakinan, dan ideologi dikembangkan dan diperjuangkan. Pendidikan di Mathla'ul Anwar, tidak terlepas dari pengaruh politik. Kebijakan pendidikan, kurikulum, dan penentuan materi pelajaran sering kali dipengaruhi oleh faktor politik. Politik pendidikan, kebijakan pemerintah, atau kelompok kepentingan mungkin berusaha mempengaruhi atau mengendalikan pendidikan untuk mempromosikan agenda politik tertentu.

Pendidikan Islam di MA dapat menjadi tempat di mana berbagai ideologi keagamaan bersaing. Kelompok-kelompok dengan pandangan dan keyakinan yang berbeda dapat mencoba mempengaruhi dan membentuk pemahaman agama yang diajarkan dalam institusi tersebut. Ini dapat menghasilkan pergumulan antara pandangan yang berbeda tentang pandangan Islam, praktik keagamaan dan praktek system pendidikan.

Pendidikan Islam di MA juga dapat menjadi target pengaruh dari kelompok eksternal, baik itu kelompok politik atau kelompok keagamaan lainnya. Misalnya, organisasi politik atau gerakan agama ekstremis berusaha mempengaruhi pemahaman keagamaan yang diajarkan di sekolah tersebut untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini

dapat menimbulkan pergumulan ideologi dan politik di dalam institusi tersebut.

Meskipun ada pengaruh politik dan ideologi keagamaan dalam pendidikan di MA, untuk mencapai kemandirian pendidikan yang sehat, maka lembaga pendidikan yang berkualitas harus mendorong pemikiran kritis, membuka ruang untuk dialog dan pemahaman yang inklusif, dan mempromosikan kebebasan akademik. Pendidikan yang baik seharusnya membantu siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang Islam tanpa kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan, membandingkan, dan mengeksplorasi berbagai pandangan.

Dalam menghadapi pergumulan politik dan ideologi keagamaan di pendidikan Islam, dalam mencapai keseimbangan, MA sebaiknya mengadopsi pendekatan pendidikan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek politik atau ideologis, tetapi juga memperhatikan pengembangan akademik, karakter, etika, dan kecakapan sosial siswa. Pendidikan yang seimbang dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang Islam, sambil mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa pandangan dan pendekatan dalam pendidikan Islam di MA dapat berbeda dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya. Berbagai pandangan dan pemahaman harus dihormati dan diajak berdialog untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

Kebijakan politik pemerintah dapat memunculkan dinamika pemikiran keagamaan dan perkembangan MA melalui beberapa faktor, di antaranya: *Pertama*. Kebebasan memilih partai politik atau mazhab

sesuai dengan hati nurani dan nalar, yakni memberikan kebebasan kepada masyarakatnya, sehingga memungkinkan MA untuk berkembang dan mengembangkan pemikiran keagamaan secara bebas dan terbuka, karena memang sejak awal MA tidak berafiliasi ke partai dan ke mazhab tertentu. *Kedua*. Keterlibatan Pemerintah dalam Pendidikan. Pemerintah yang memberikan dukungan dan perhatian terhadap dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama, dapat membantu Mathla'ul Anwar dalam memperluas jaringan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Ketiga. Pengakuan Pemerintah terhadap Lembaga Keagamaan. Pemerintah yang mengakui dan memberikan dukungan terhadap lembaga keagamaan, termasuk MA akan mempermudah dalam pengumpulan dana dan bantuan dari masyarakat dan pihak lainnya. *Keempat*. Adanya Kontrol terhadap Lembaga Keagamaan. Pemerintah yang melakukan kontrol terhadap lembaga keagamaan, seperti MA, untuk memastikan tidak terjadi penyebaran ajaran radikalisme dan intoleransi yang dapat merusak kerukunan umat beragama. *Kelima*. Kebijakan Pendidikan Nasional. Kebijakan pendidikan nasional yang diambil oleh pemerintah dapat mempengaruhi perkembangan MA dalam hal kurikulum dan sertifikasi pendidikan, sehingga MA dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, kebijakan politik pemerintah dapat mempengaruhi dinamika pemikiran keagamaan dan perkembangan MA, baik secara positif maupun negatif. Namun, MA sebagai lembaga keagamaan memiliki otonomi dalam mengembangkan pemikiran keagamaan dan mencari solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi, serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan umat beragama dan

menghasilkan pemikiran yang sejalan dengan ajaran Islam yang moderat dan toleran.

5.1. Dinamika Pemikiran Keagamaan

Di awal masa perkembangannya, MA dengan ideologi keagamaan *Ahlussunah Waljamaah* telah mewujudkan masyarakat yang moderat dengan karakter individu terhadap realitas pluralisme agama yang ada di MA, yang membutuhkan berbagai prinsip universal, termasuk kebebasan, kesetaraan, rasionalisme, humanisme, peradaban, kasih sayang dan keindahan.

Melalui regulasi dan sistem pendidikan yang ada di MA baik secara tertulis maupun bersifat kultural, kurikulum pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah tetap harus diidentifikasi dan diseleksi, sehingga persyaratan yang dirumuskan mampu menyesuaikan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat apakah menempatkan hanya kepentingan ideologi hierarki semata, atau justru mempertimbangkan yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan keberagaman. Gerakan yang dilakukan oleh MA tentu saja mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan keberagaman, dan tidak fanatik kepada salah satu mazhab namun tetap mengacu kepada hadis sahih, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam khittah MA.

Perkembangan corak pemikiran internal organisasi keagamaan dari berbagai hasil muktamar tentu saja mempengaruhi perkembangan internal organisasi keagamaan sehingga hasilnya dapat menunjukkan arah dan orientasi MA terkait dengan pendidikan pada Muktamar I (1936) dan Muktamar II (1937) mampu menetapkan rencana pelajaran atau *leerplan* (kurikulum). Dengan demikian demi terlaksananya rencana pelajaran (*leerplan*) dengan baik disesuaikan dengan ketentuan

dan kebijakan, maka jalan untuk memodifikasi pendidikan Islam menjadi modern, tidak akan tertinggal, tapi juga tidak terbawa arus westernisasi.

Pada muktamar III (1939) sosok Mas Abdurahman sangat penting dalam mengembangkan dan memajukan organisasi sehingga untuk menentukan pemimpin harus memiliki visi dan misi ke depan, termasuk sistem pendidikan, untuk melaksanakan sistem pendidikan terlebih dahulu harus menyelesaikan berbagai problem sosial yang ada di masyarakat. Maka terpilihnya Uwes sebagai ketua umum merupakan pemimpin yang paham terhadap perkembangan sosial dan politik terlebih dalam meningkatkan kemajuan pendidikan.

Pada muktamar IV (1940), Muktamar V (1941) dan Muktamar VI (1943) dengan kepemimpinan Uwes, setidaknya berhasil menyelesaikan tugas kepemimpinannya dalam mengkonsolidasikan organisasi menyusul hasil kontroversial dari Kongres ketiga, didukung kuat oleh K.H. Mas Abdurrahman hingga wafatnya pada tahun 1944, Uwes berhasil menyelenggarakan Kongres pada tahun 1943 dimana ia tanpa ada lawan terpilih sebagai ketua umum sekalipun dalam proses pemilihan kepemimpinan ini menimbulkan frustrasi yang meluas di kalangan anggota MA, khususnya K.H. Djunaedi dan para pendukung setianya, meski tidak secara terang-terangan menunjukkan ketidakpuasannya. Namun, beberapa bulan kemudian penentangan mereka segera mengemuka seperti K.H. Djunaedi dan adiknya, Nyi Hajjah Zaenab, selaku ketua madrasah MA untuk putri, mendirikan madrasah sendiri yang diberi nama Maslahul Anwar. Ketegangan politik ini merupakan kejadian pertama yang dihadapi oleh Mathla'ul Anwar.

Perkembangan pada muktamar VII (1951), Muktamar VIII (1952) dan Muktamar IX (1953-1956) di masa kemerdekaan menuju perubahan ke arah yang lebih baik, karena perjuangan untuk revolusi di mana bangunan madrasah baik di Menes maupun di daerah lain hancur lebur. Berkontribusi untuk menyatukan kembali para pemimpin kelompok yang sudah terpecah belah. Pada tahun 1949, sekembalinya dari medan perang, K.H. Djunaedi dan adiknya, Hj. Zainab, bergabung kembali dengan MA saat mereka menggabungkan madrasah mereka sendiri ke dalam asosiasi tersebut.

Dampak dari perkembangan tersebut terhadap pendidikan di MA pada tahun 1950, MA mendapatkan pengakuan resmi atas madrasahnyanya dari pemerintah. Dengan status resmi tersebut, alumni madrasah MA setara dengan sekolah negeri. Namun, diresmikannya madrasah MA memaksa organisasi untuk mengadopsi sistem sekolah baru yang diperkenalkan oleh pemerintah di mana sekolah dibagi menjadi tiga tingkatan: sekolah dasar dengan enam tahun, sekolah menengah pertama dengan tiga tahun, dan sekolah menengah atas dengan tiga tahun.

Pada Muktamar X di Menes (1956-1959), Muktamar XI (1966) dan Muktamar XII (1975), lima tahun setelah kemerdekaan, pada tahun 1950 MA kemudian membagi sistem sekolah sembilan tingkat menjadi dua tahap, yaitu tahap dasar dan tahap menengah. MA tampaknya sangat mengapresiasi perubahan persekolahan ini selama tidak memberikan dampak signifikan pada elemen fundamental dalam sistem pendidikan. Kenyataannya tidak selalu seperti yang diharapkan. Sepuluh tahun kemudian pada tahun 1965, di masa kemerdekaannya, sangat berat dalam menjaga marwah organisasi di satu sisi ingin mempertahankan kemerdekaan, peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, banyaknya

demonstran menuntut perubahan, di sisi lain menjaga organisasi untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan dalam mengelola pendidikan.

Perkembangan selanjutnya dari hasil Muktamar XIII (1985) dan Muktamar XIV (1991) yang perkembangannya berjalan sesuai dengan programnya mulai dari pendidikan, dakwah dan sosial. Program ini dikembangkan dengan *dakwah bil hal*, sehingga wilayah dan daerah MA terus berkembang sampai ke Nusantara. Pembinaan bidang pendidikan terus ditingkatkan, mulai dari pesantren, madrasah dan sekolah sampai ke perguruan tinggi lebih tepatnya pada Muktamar XV, MA membangun jaringan ke berbagai daerah di hampir seluruh propinsi di Indonesia, serta akan mendirikan Universitas Mathla'ul Anwar. Berlanjut dan memasuki era reformasi bertepatan dengan Muktamar XVI (2001) dengan peningkatan mutu, sehingga menambah jam pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah umum menjadi 6 jam pelajaran di tingkat SD dan 4 pelajaran di tingkat SLTP dan SLTA.

Pada Muktamar XVII (2005) MA menegaskan kembali di bidang pendidikan, sosial dan dakwah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, kemudian Muktamar XVIII (2010) MA lebih berperan aktif pada berbagai bidang khususnya ekonomi baik tingkat nasional maupun internasional, kemudian di muktamar XIX (2015) lebih fokus kepada persoalan kerukunan lintas agama melalui jalur moderasi agama, anti radikalisme, sehingga MA menegaskan secara nyata bahwa dengan memajukan bidang pendidikan, dakwah, dan sosial merupakan gerakan strategis yang memberi andil besar bagi peningkatan kualitas kehidupan umat Islam dalam beragama.

Pada Muktamar XX (2021) MA berupaya dan berusaha pada bidang pendidikan, dakwah dan sosial, sekaligus mendukung program

pemerintah mengenai moderasi beragama melalui jejaring pendidikan agama di berbagai daerah dengan berkomitmen spirit yang memiliki konsep kepesantrenan dan keterampilan bagi generasi muda.

5.2 Kebijakan Politik Pendidikan

Dinamika pemikiran keagamaan dibangun MA sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan tentu saja sangat menyesuaikan dengan kebijakan politik pemerintah, termasuk dengan kebijakan politik pendidikan, dengan tujuan mengeksplorasi sumber daya manusia demi kepentingan masyarakat bahkan golongan. Kepentingan kelompok atau organisasi keagamaan tertentu dari berbagai corak pemikiran yang berbeda akan melahirkan perselisihan internal yang sangat berdampak terhadap perkembangan organisasi, salah satunya adalah bagian pendidikan, meningkat dan majunya pendidikan menjadi besar karena mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat setempat secara luas.

Apalagi MA merupakan organisasi keagamaan yang sejak awal lebih mengutamakan pendidikan, karena pendidikan menjadi tolak ukur atau barometer kemajuan masyarakat tertentu, kualitas masyarakat dilihat dari mutu pendidikan sekalipun harus mengikuti alur dan politik yang berkembang. Pada saat itu keberadaan lembaga pendidikan MA terbesar di Banten dan tersebar ke daerah sampai ke pelosok, melakukan kegiatan aktif terhadap perkembangan peristiwa pada saat itu, dimana fenomena yang terjadi harus mengacu dan berpedoman pada organisasi keagamaan yang sudah diakui secara nasional, termasuk organisasi SI yang paling tua dan mashur, sehingga MA lebih memilih organisasi NU untuk diajak kerjasama karena tradisionalisnya ketimbang SI yang lebih didominasi kalangan modernis, yakni Muhamadiyah.

Faktor penting berdirinya MA, tidak hanya menangani masalah agama saja, tetapi juga berurusan dengan masalah sosial dan pendidikan, sama halnya dengan MA berusaha meningkatkan dan membangun komunikasi di antara kiai dan ulama terutama dalam memperbaharui lembaga pendidikan, baik pesantren ataupun madrasah dan MA berjuang mempertahankan kedudukannya sebagai gerakan non-politik tetapi bersikap kritis terhadap pemerintah Belanda.

MA dibangun atas dasar kekuatan ideologi yang memperkuat legitimasi bahwa MA adalah gerakan ulama yang ingin membangun pendidikan melalui gerakan dakwah dan sosial. MA dengan gerakan non politiknya, tetap mempertahankan identitasnya sebagai gerakan yang memusatkan perhatian pada pendidikan. Tetapi ada sebagian pula mengikuti politik dengan diberikan kebebasan memilih karena hak politiknya, atau organisasi lain sekalipun hanya gerakannya di tingkat lokal.

Khittah MA melalui identitas dan tujuan pendidikan, tentu saja corak pemikiran keagamaan yang dibangun dan dirancang menjadi instrumen dalam rangka menumbuhkan sikap *tasammuh*, yaitu dengan Aswajanya, bersikap akomodatif dan moderat sesuai dengan khittah MA, Sebagai kelompok keagamaan lokal, MA memberikan kesempatan untuk menempuh dan menentukan empat mazhab sebagai salah satu praktik keagamaan yang menjadi aktivitas MA dengan corak pemikiran tradisionalnya tentu saja menolak reformasi pemikiran dan praktik keagamaan sebagaimana yang diperjuangkan oleh gerakan reformis, maka MA mengutuk keras kelompok reformis yang tidak memberikan perhatian besar secara leluasa kepada masyarakat untuk mengikuti salah satu mazhab. MA dimasa Ki Mas Abdurahman, gagasan dan idenya

yang sangat konsisten, yang dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat di satu sisi, namun di lain sisi MA, sangat mendukung reformasi agama dan menolak keras terhadap tradisi sinkretik lokal.

Oleh karena itu MA mengambil langkah cepat dalam mengembangkan pendidikan Islam dengan pendidikan yang dilaksanakan MA secara informal, dari surau ke surau, majelis ke majelis, langgar ke langgar, kampung ke kampung. Sistem pengajaran seperti ini tidak berkelas-kelas, tidak memakai bangku, meja, papan tulis dan hanya duduk sila saja, mendengarkan syiar agama dari kiai secara serius memakai sistem klasikal.

Setelah kedaulatan penuh yang diberikan oleh Belanda kepada pemerintah, Pendidikan menjadi pusat kegiatan pembelajaran di setiap organisasi keagamaan termasuk MA, dengan tradisi pesantrennya menggunakan kharisma seorang kiai mengajarkan nilai dan konsep keislaman melalui pengamalan yang berorientasi pada fiqih, dan penggunaan tradisi dalam berbagai ritual keagamaan yang berpusat pada *Majlis Fatwa Wat Tabligh*. Hal demikian yang melekat pada gaya dan ideologi *Ahlus al-Sunnah wa al-Jama'ah* yang diamalkan oleh MA, maka dapat dikategorikan ke dalam gerakan tradisionalis. Pesantren, madrasah dan sekolah MA mengalami revitalisasi sesuai dengan keinginan untuk memiliki komitmen keagamaan, baik secara ideologis terhadap paham keyakinan maupun secara organisatoris ke-*Mathla'ul Anwar*-an sepenuhnya akan dan telah tercapai.

Dengan adanya *Majlis Fatwa Wat Tabligh* MA, yang diberikan wewenang untuk memberikan pemahaman keagamaan yang terkait dengan penguatan dan pelaksanaannya sesuai dengan ideologinya, maka MA pertama kalinya menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

(dulu SMI) sehingga pada tahun ajaran pertama, kelas satu memiliki dua kelas paralel. Selanjutnya SMPI ini dikembangkan menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama).

Adanya lembaga pendidikan umum ini menunjukkan indikasi yang kuat dan telah tampak diajarkannya konsep ke-*Mathla'ul Anwar*-an sebagai indoktrinasi pesan-pesan ideologis yang tertuang dalam khittah MA. Hal ini pula harus disesuaikan dengan pembelajaran dan pentingnya paham keagamaan dengan menekankan pentingnya kualifikasi pendidikan ustadz di pesantren dan pendidik di madrasah atau sekolah, yang betul-betul memahami Islam sebagaimana MA memahaminya.

MA dalam sejarah perkembangannya memiliki peran besar di Banten, apalagi kedekatannya dalam mengelola pendidikan berkolaborasi dengan para kiai dengan ciri khas kepemilikan pesantrennya, MA merupakan salah satu organisasi keagamaan yang tidak berpartai dan berafiliasi ke partai manapun, karena sejatinya, ruh MA itu lebih mengedepankan pendidikan Islam, yang steril dari kepentingan politik. Apalagi pesantren dan madrasah warisan ulama yang dapat membangun 'suasana' pendidikan yang mencerahkan, mengedepankan nilai substansi agama tanpa diindoktrinasi, mentradisikan kebebasan akademik, dan selalu melakukan perubahan untuk kemajuan bangsa yang mandiri dan berbudaya, sebuah gerakan pembaharuan sistem pendidikan Islam, yang tentu saja berdasarkan paham Ahlussunah wal Jamaah yang diyakini bersumber pada al Qur'an Sunah, Ijma' dan Qiyas, yang mengandung tujuan ideologis, landasan, prinsip dan unsur-unsur ideologis. MA dengan Majelis Pendidikan Pengajaran melaksanakan rencana pelajaran (*leerplan*) serta pedoman

pendidikan yang termasuk dalam bidang garapan MA, gerakan MA yang ditunjukkan dalam pembaruan sistem pendidikan Islam, kegiatan dakwah islamiyah, dan perbaikan kehidupan sosial.

Dengan gerakan keagamaan, MA memiliki basis dan akar yang kuat, ada pula gerakan yang *nonmainstrim*, berangkat dari gerakan keagamaan transnasional, sangat menjamur pada masa jatuhnya rezim Orde Baru. Siapa pun, organisasi apapun bisa masuk MA dengan tujuan kepentingan pribadi atau golongan dan tujuan mengatasnamakan agama dan organisasi, mempolitisasi agama di situasi politik praktis demi kepentingan partai politiknya.

Hal ini pula yang dikembangkan oleh MA di masa transisi dengan kepemimpinan Irsyad Djuwaeli dilakukan untuk memastikan bahwa secara komprehensif dalam memahami agama, budaya dan sosial harus didasarkan kepada ke-*Mathla'ul Anwar*-an sehingga tidak keluar dari kepentingan dan kemajuan organisasi MA. Mewujudkan kepentingan dan kemajuan, sesungguhnya MA, tidak seperti organisasi pada umumnya tidak ada penekanan untuk menunjukkan bahwa loyalitas dan komitmen dalam memajukan khususnya pada lembaga pendidikan dengan melabelkan nama *Mathla'ul Anwar*, namun yang terpenting menerapkan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kepentingan umat.

Organisasi keagamaan MA, dengan berakidah Islam dengan *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dan berasaskan Pancasila. Tujuan berdirinya MA untuk menjadikan ajaran Islam sebagai dasar kehidupan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan dan penindasan yang dilakukan penjajah dan orang pribumi yang merusak kondisi lingkungan masyarakat. MA menjadi organisasi masyarakat Islam yang membantu dalam gerakan

modernisasi Islam dengan menumbuhkan semangat perjuangan dan pemikiran yang diluruskan di kalangan umat agar tidak terpengaruh terhadap eksploitasi kaum imperialis.

C. Pendidikan Islam di Mathal'ul Anwar : Antara Tradisionalitas, Modernitas dan Fundamentalisme

Pendidikan Islam di MA sekalipun berada dalam antara tradisionalitas, modernitas, dan fundamentalisme, akibat dari pergumulan dan perbedaan pendekatan dalam konteks yang relevan. MA telah memiliki akar tradisional dalam pendidikan Islam, di mana pendekatan dan metodologi pengajaran didasarkan pada warisan tradisi keagamaan dan pengajaran yang telah ada sejak lama khususnya di tahun 1905. Hal ini mungkin mencakup penekanan pada studi Al-Qur'an, hadis, fiqh (hukum Islam), dan warisan keagamaan lainnya. Pendidikan tradisional seringkali menekankan pada pembelajaran hafalan dan pengajaran otoritatif dari sang kiai.

5.1 Konteks Pendidikan Mathal'ul Anwar

MA juga berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman modern. Pendidikan Islam di institusi ini mungkin mencakup pemahaman yang lebih luas tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan sosial dan budaya. Pendekatan pendidikan yang inklusif, berbasis penelitian, dan mempromosikan pemikiran kritis dan kreativitas mungkin diperhatikan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia modern.

Namun, dalam beberapa kasus, MA telah menghadapi tantangan dari pandangan fundamentalisme dalam pendidikan Islam. Fundamentalisme dapat mencerminkan pendekatan yang

mempertahankan pandangan agama yang kaku, menolak perubahan, dan menolak dialog dengan pandangan lain. Hal ini dapat mempengaruhi pendidikan di institusi tersebut dengan menekankan pemahaman yang sempit, menolak pemikiran kritis, dan mempromosikan pemahaman agama yang eksklusif.

Dalam menghadapi pergumulan ini, penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara tradisionalitas, modernitas, dan pencegahan dari fundamentalisme. Hal yang demikian perlu adanya pendekatan *holistic* yang memperhatikan aspek-aspek tradisional, modern, dan fundamentalisme dalam pendidikan Islam. Mengintegrasikan nilai-nilai tradisional yang berharga dengan pemahaman yang relevan dengan perkembangan zaman.

Pendidikan yang inklusif yang mendorong pembelajaran yang inklusif, terbuka untuk pemikiran kritis, dan dialog antara berbagai pandangan dan pemahaman keagamaan. Penekanan pada pemahaman yang kontekstual dengan memahami agama dalam konteks zaman modern dan memperhatikan tantangan dan perubahan sosial-budaya yang terjadi. Pembinaan karakter yang seimbang yakni mengembangkan siswa yang memiliki pemahaman agama yang kuat dan toleran, serta memiliki kemampuan berpikir kritis, empati, dan keterampilan sosial. Tentu saja, pendekatan dalam pendidikan Islam di MA akan bervariasi tergantung pada pemimpin dan pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Sekalipun pimpinan MA aktif dan berperan di partai politik, MA dengan khittahnya, tetap mendukung secara politik yang terpenting tidak mengatasnamakan lembaga dan membawa partai apapun karena pada prinsipnya MA dengan aktivitasnya tidak terafiliasi dengan golongan

atau partai apapun. Karena MA pada awalnya merupakan lembaga pendidikan Islam modern dalam bentuk *madrrasah*. Namun demikian ada pula banyaknya faksi-faksi baik dari kalangan tradisional lokal maupun reformis modernis yang sering memunculkan pertentangan dan permusuhan karena konflik keagamaan, apalagi didukung dengan gerakan yang terafiliasi radikal yang pada akhirnya agama dijadikan politisasi untuk menebarkan kekuatan dan otoritas ideologi sampai kepada jaringan. Sehingga wajar hal demikian menyebabkan lahirnya gerakan tradisional, reformis, dan fundamentalis.

5.2 Peran Mathal'ul Anwar dalam Pemersatu Tradisionalitas dan Modernitas

Perbedaan antara gerakan tradisional, reformis, dan fundamentalis tidak terlepas daripada perbedaan pandangan, pendekatan, dan sikap terhadap ajaran agama serta perubahan sosial dan budaya. Gerakan tradisional cenderung mempertahankan dan menghormati tradisi serta nilai-nilai yang telah ada sejak lama, mengikuti ajaran agama dan menolak perubahan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah mapan. Sedangkan gerakan reformis cenderung ingin mereformasi atau memperbarui ajaran agama agar sesuai dengan konteks dan tuntutan zaman yang berubah, termasuk menafsirkan ajaran agama secara lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Kaum reformis berusaha mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan perkembangan sosial, ilmiah, dan budaya modern. Adapun gerakan fundamentalis cenderung memegang teguh ajaran agama secara *letterleek* dan sering kali menolak tafsir alternatif dan memandang bahwa ajaran agama harus diikuti secara murni dan tidak boleh dikompromikan.

Dari spektrum pandangan dan pendekatan di antara masing-masing kelompok, dan orang-orang dalam kelompok yang sama juga bisa memiliki perbedaan pendapat dan melahirkan perdebatan. Perdebatan ini melahirkan terbentuknya sejumlah jaringan agama. Para pendukung reformis menyamakan dirinya dengan beberapa perserikatan modernis yang mempromosikan pandangan-pandangan keagamaan begitupun tradisionalis, reformis dan fundamentalis bergabung dengan organisasi-organisasi seideologinya. Pada akhirnya pendirian lembaga pendidikan begitu masif yang dilaksanakan di beberapa daerah seperti Lebak, Lampung, Karawang, Bandung. Sekalipun pada akhirnya pula banyak munculnya persoalan agama, ada yang mengikuti mazhab tradisional namun tidak sedikit juga yang mengikuti MA justru berusaha melenyapkan sejumlah praktik keagamaan lokal.

Praktik keagamaan lokal lebih sering ditemukan di pesantren karena sejak munculnya tradisi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari tokoh agama yang memiliki otoritas sehingga keberadaan pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama, pluralisme, sistem pendidikan Islam yang benar-benar memahami karakter dan nilai budaya diadopsi oleh bangsa Indonesia.

Pendidikan di ruang lingkup pesantren dapat menghasilkan output yang tinggi, tidak hanya ahli di bidang agama, melainkan juga harus kompeten di bidang ilmu pengetahuan sebagai bentuk penguatan karakter yang harus dimiliki oleh setiap individu. Dari sana perlu adanya inovasi untuk menjadikan pondok pesantren, MA sebagai institusi pendidikan Islam yang mampu mempersatukan sehingga bertahan dengan perkembangan zaman. Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks masyarakat yang pluralis dan religius,

pesantren hadir memiliki tradisi intelektual yang kuat, terutama untuk membentuk ide-ide kehidupan masyarakat ideal. Selain itu, pesantren memiliki legitimasi sosial dan budaya, melalui kharisma dan sosok kiai di lingkungan pesantren dan masyarakat umum.

Dalam perkembangan selanjutnya, pesantren bertransformasi menjadi madrasah berkembang pesat yang dilengkapi dengan semua fasilitas yang mendukung terhadap proses pembelajaran. Pendidikan madrasah di MA yang dilaksanakan pada awal pertumbuhan Islam yang dimulai pada masa prakemerdekaan sebagai upaya penyebaran pemikiran Islam dan dasar-dasar ajaran Islam. Hadirnya madrasah dengan fungsi dan tujuan lembaga, MA mengambil langkah cepat melaksanakan misinya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui studi dan pembelajaran yang memiliki peran dalam mengembangkan budaya, karena madrasah sebagai lembaga sosial lembaga tersebut menjalankan fungsi sosialnya seperti halnya lembaga pendidikan lainnya.

Madrasah melalui ideologinya sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai karakter unggul, karena pendidikan diajarkan di sana, agama lebih dan lebih mendalam daripada sekolah umum. MA dengan memanfaatkan situasi dan segala fungsi madrasah sebagai lembaga sosial, membantu anak-anak dalam mempelajari kehidupan di tempat kelahiran mereka sendiri; mentransmisikan dan mentransformasikan budaya; dan mengantarkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Secara idealnya MA telah menyelenggarakan madrasah, meskipun dipandang sebagai upaya memperkuat eksistensi pendidikan Islam justru memperkuat dan memperluas penetrasi kepentingan ideologis lembaga

penyelenggara. Kondisi ini jika diamati dengan seksama, itu telah menjadi tren di MA untuk menjawab harapan masyarakat, yang cenderung terindoktrinasi dengan mengubah struktur penerapan syariat Islam dan Pancasila sebagai ideologi negara telah membawa politik baru dalam pemerintahan Orde Baru. Dalam konteks politik, pendidikan formal terkadang digunakan sebagai wadah dan sekaligus menjadi strategi baru bagi kelompok Salafi dalam menyebarkan doktrinnya di lingkungan lembaga pendidikan, apalagi didukung oleh pimpinan yang terindikasi dengan gerakan salafi.

Dengan adanya persaratan yang menitikberatkan pada keberagaman sebagai tanda memastikan bahwa diseminasi ideologi dapat berproses pada keberlangsungan lembaga pendidikan yang ditentukan oleh kemampuan dan keagamaannya berdasarkan latar belakang pendidikan tingginya. Kuatnya pengaruh ideologi dalam lembaga pendidikan yang ditunjukkan dengan komposisi kuatnya donatur dan menerima tunjangan akan memperkuat sejumlah analisis bahwa proses demikian menjadi sentral kaderisasi yang memiliki kontribusi dalam penyebaran ideologi baik dari tenaga pendidik maupun kaum intelektual sebagai proses kaderisasi yang akan ditempatkan ke daerah atau pelosok Indonesia yang menjadi pusatnya di Menes, khususnya MA.

Dalam mendukung dan menjaga komitmen dari setiap penyelenggara pendidikan, khususnya di MA setiap kegiatan formal sudah semestinya dilakukan, lebih dari itu, kegiatan keislaman atau kajian-kajian difasilitasi oleh pengurus besar dan dukungan dari pemerintahan Orde Baru yang memiliki kewenangan untuk

memonitoring kajian-kajian yang terindikasi kepada radikalisme, intoleran dan hal-hal yang berbau intimidasi kepada setiap kadernya.

Hal yang terpenting bagaimana mendalami kajian keislaman berdasarkan sumber-sumber yang relevan, merupakan hal substantif seorang kader atau pendidik dalam memperdalam ilmu pengetahuan dan khazanah intelektual. Selain itu monitoring dilakukan melalui kajian dipandang sebagai salah satu cara untuk memastikan komitmen keagamaan dalam menjalankan tugas dan substansi yang disampaikan sebagaimana prinsip khittah MA.

Dari dampak kebijakan politik, perselisihan pelbagai kepentingan antar organisasi kagamaan yang terjadi, yang berdampak pada pendidikan, MA pada masa itu banyak juga kalangan elit agama, dengan gagasan barunya mempromosikan cara-cara baru dalam memahami ajaran agama Islam yang murni dengan tujuan untuk mensucikan doktrin-doktrin bersifat mistis sehingga memunculkan reaksi keras antara pemikir tradisionalis dengan reformis atau fundamentalis. MA melalui ideologi keagamaan tentu saja dalam menghadapi kebijakan memiliki cara berpikir yang berbeda baik tradisionalis, reformis, dan fundamentalis terhadap pendidikan, tergantung pada konteks budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Tradisionalis, cenderung didasarkan pada penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai yang telah ada sejak lama. Dalam konteks pendidikan, tradisionalis mungkin memandang pendidikan sebagai upaya untuk mempertahankan warisan budaya, mengajarkan nilai-nilai dan adat istiadat yang diteruskan dari generasi ke generasi. Pendekatan pengajaran yang berpusat pada guru, di mana otoritas guru dihormati,

kurikulum yang sudah mapan diikuti, dan penekanan diberikan pada pelajaran yang berakar pada tradisi.

Reformis cenderung melibatkan pemikiran kritis terhadap sistem pendidikan yang ada dan keinginan untuk melakukan perubahan dan peningkatan. Reformis mungkin percaya bahwa pendidikan harus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan kemajuan teknologi. Mungkin saja dapat mendorong adanya inovasi dalam metode pengajaran, pengembangan kurikulum yang relevan, dan penggunaan teknologi pendidikan yang canggih untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan.

Sedangkan fundamentalis cenderung didasarkan pada keyakinan kuat terhadap prinsip-prinsip atau doktrin tertentu yang dianggap tidak dapat ditawar. Dalam konteks pendidikan, fundamentalis mungkin berpegang teguh pada suatu sistem atau ideologi tertentu dan menolak perubahan yang dianggap bertentangan dengan keyakinan tersebut. Fundamentalis lebih menginginkan pendidikan yang konsisten dengan keyakinan agama, ideologi politik, atau nilai-nilai tradisional yang dianggap sebagai "benar" menurut pandangannya.

Pendidikan Islam di MA mencerminkan perpaduan antara tradisionalitas, modernitas, dan fundamentalisme dalam konteks pendidikan agama. MA sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama sesuai dengan perkembangan zaman.

Tradisionalitas mengacu pada pemeliharaan dan pengajaran nilai-nilai dan praktik-praktik Islam yang sudah ada sejak lama. Lembaga pendidikan Islam tradisional sering kali menekankan pada pemahaman teks-teks klasik, seperti Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya.

Mereka mungkin mempertahankan metode pengajaran yang telah digunakan selama berabad-abad, seperti menghafalan dan penafsiran teks-teks klasik.

Di sisi lain, pendidikan Islam di MA mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan zaman modern, dengan memperkenalkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan teknologi berbasis pendidikan untuk memperluas akses siswa terhadap pengetahuan agama. MA yang mengintegrasikan mata pelajaran umum dengan pendidikan agama, seperti ilmu pengetahuan Alam dan Sosial, matematika, dan bahasa, bertujuan agar siswa memiliki pemahaman yang holistik tentang Islam dan dapat berkontribusi dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Namun, pendidikan Islam di MA dalam menghadapi tantangan fundamentalisme. Pemahaman yang sempit atau ekstrem terhadap Islam dapat muncul dalam beberapa konteks pendidikan agama. Ini dapat mengarah pada pengajaran yang kurang inklusif dan menekankan pada doktrin-doktrin yang dogmatis, mengabaikan aspek-aspek kritis dan pemahaman yang lebih luas tentang agama. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan seperti Mathal'ul Anwar untuk memastikan bahwa pendidikan agama mereka mempromosikan toleransi, inklusivitas, dan pemahaman yang kritis terhadap agama.

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara tradisionalitas, modernitas, dan menghindari fundamentalisme, lembaga pendidikan MA dapat mengadopsi pendekatan yang berbasis pada pemahaman yang holistik dan seimbang tentang agama Islam. Ini dapat mencakup pengajaran teks-teks klasik dengan konteks zaman modern, penerapan metode pengajaran yang interaktif dan inklusif, serta memberikan kesempatan untuk diskusi dan pemikiran kritis tentang isu-isu agama.

Dengan pendekatan ini, lembaga pendidikan Islam dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik, sosial, dan spiritual siswa tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional agama.

D. Implikasi terhadap Pendidikan Islam di Mathlaul Anwar

Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan dapat mempengaruhi kurikulum, metode pengajaran, dan pengelolaan lembaga pendidikan. Pemerintah setelah kemerdekaan memiliki kebijakan pendidikan yang mendukung pendidikan Islam yang inklusif dan modern, khususnya MA telah mengintegrasikan metode dan materi pengajaran yang lebih luas dan holistik. Sekalipun kebijakan pendidikan lebih cenderung membatasi atau mengatur ketat pendidikan agama, lembaga ini mungkin menghadapi kendala dalam mengimplementasikan metode pengajaran yang lebih progresif.

MA sebagai organisasi keagamaan terbesar di Banten, karakteristik MA sering dipertautkan secara historis dengan pola penyebaran Islam secara kultural. Karakteristik ini memperlihatkan kesinambungan antara keagamaan dengan pendidikan, sekalipun pada waktu itu adanya ordonansi sekolah liar, dan ordonansi guru merupakan wujud bentuk pendidikan yang sangat diskrimatif ditambah politik etis yang sangat mempersulit pribumi dalam mengenyam pendidikan.

MA dengan ideologi keagamaan yang dibangun oleh kiai dan ulama melalui pembelajaran klasikal dan tradisional sampai kepada sistem kelas tetap melakukan pembelajaran. Berdasarkan kenyataan tersebut sebagai organisasi yang tertua tentu saja pendidikan disebarkan melalui dakwah demi peningkatan standar mutu pendidikan serta

memperkokoh pemahaman Islam di masyarakat melalui pendirian pesantren, madrasah dan lembaga pendidikan lainnya.

Konflik dalam dinamika politik internal lembaga pendidikan dapat mempengaruhi pendidikan Islam di MA. Pertentangan antar kelompok, kepentingan pribadi, atau perselisihan antara anggota dan kader dapat mengganggu keberlangsungan dan kualitas pendidikan yang diberikan. Oleh karena itu, bagi MA untuk menjaga stabilitas internal, membangun hubungan yang baik antara anggota, dan mengutamakan misi pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Perubahan identitas agama dapat memiliki konsekuensi penting bagi individu dan masyarakat. MA dalam khittahnya tidak berafiliasi, bervariasi dalam pola organisasi keagamaan yang tidak terafiliasi dapat mempengaruhi politik, termasuk krisis politik dan lingkungan yang mempengaruhi identitas agama dan model pendidikan. Sekalipun, penelitian sebelumnya tidak banyak memberikan model apa pun termasuk pendidikan dari pengaruh dan aktivitas di negara-negara yang berkembang tentang pola pemikiran pengumpulan politik melalui ideologi keagamaan, dinamika pemikiran keagamaan, khususnya organisasi MA dalam mengembangkan lembaga pendidikan.

Penting untuk dicatat bahwa sepanjang sejarah perkembangan MA, secara ideologis tetap berpedoman pada al Qur'an dan As Sunah yang dimaksud dengan ideologi keagamaan dengan identitas dalam konteks kenegaraan dan keorganisasian, radikalisme tidak akan diterima sebagai ideologi karena melakukan perubahan sistem sosial dan politik di Indonesia melalui berbagai bentuk kekerasan atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik maupun mental, dengan kata lain radikalisme adalah sikap individu yang menggunakan bentuk-bentuk kekerasan dalam melakukan perubahan sosial politik atas nama agama.

Selain itu, penting juga untuk dipahami bahwa kolonialisme, imperialisme dan radikalisme tidak hanya dapat terjadi pada individu atau kelompok agama tertentu, tetapi bisa terjadi di semua agama. Pentingnya keberadaan MA sejak berdirinya sudah memiliki sikap anti kolonialisme, imperialisme, dan radikalisme dalam sebuah upaya membentuk sikap beragama sejalan dengan pentingnya menjunjung tinggi berbagai nilai kemanusiaan (antroposentris) karena pendidikan mengandung nilai kemanusiaan.

Perkembangan pendidikan MA dimulai sistem pengajaran yang tidak berkelas-kelas, tidak memakai bangku, meja, papan tulis dan hanya duduk sila saja, dengan metode mendengarkan ceramah agama dari seorang kiai tanpa dikritisi, pembelajaran yang secara serius memakai sistem klasikal namun tetap memodifikasi pendidikan Islam menjadi modern yang tidak tertinggal, tapi juga tidak terbawa oleh arus westernisasi. Keinginan bertahan di tengah pergolakan yang semakin kuat di bawah tekan kolonialisme Belanda, MA menempatkan lembaga pendidikan yang dikelolanya sebagai instrumen strategis dalam penyebaran dan pembentukan identitas ideologi.

Kontestasi ideologi agama di masyarakat lebih luas dapat mempengaruhi cara MA untuk menyampaikan dan memahami ajaran Islam. Perselisihan atau perbedaan pandangan dalam masyarakat sekitarnya, hal itu mungkin tercermin dalam lingkungan pendidikan. Kontestasi ini dapat memicu pengaruh ideologi yang keras atau fundamentalisme dalam pendidikan agama di MA, atau sebaliknya, dapat mendorong lembaga tersebut untuk mempromosikan pendekatan yang lebih inklusif, dialogis, dan pemahaman yang luas terhadap Islam.

Dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi ideologis, hanya bisa dilakukan melalui pendidikan. Pesantren, madrasah dan sekolah mengorganisir ketiga gerakan keagamaan tersebut, di mana tidak hanya ideologi yang disemaikannya, karena jauh yang lebih penting adalah terbangunnya struktur regenerasi yang lebih unggul dan sistematis, termasuk bagaimana mengelola pendidikan pesantren, madrasah dan sekolah.

Dalam hal kontestasi ideologi keagamaan, MA secara konsisten mengartikulasikan dan memperkuat identitas diri melalui berbagai aspek pendidikan. Berbagai variabel yang terkait lingkungan dan situasi belajar yang kondusif, konten kurikulum lengkap, dan pemimpin madrasah dan guru yang memiliki perspektif ideologis, memberikan efektif dalam menyebarkan ideologi agamanya. Sekalipun perselisihan internal dalam organisasi dan biasa terjadi, tapi tidak menjadi penghalang bagi mengembangkan pendidikan Islam, khususnya pada lembaga pendidikan yang ada di MA, tidak menjadikan hambatan yang berarti, apalagi lembaga pendidikan yang menanamkan nilai pendidikan Islam dengan adanya lembaga organisasi yang cukup berpengaruh.

Terutama madrasah MA salah satu lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat di Menes khususnya dan Banten pada umumnya. Bahkan, tidak berlebihan kalau MA menjadi kebanggaan bagi masyarakat Menes. Penyelenggaraan pendidikan di setiap cabang MA hanya diizinkan menyelenggarakan madrasah berdirinya sampai kelas IV (empat), sedangkan untuk kelas V, VI dan VII harus belajar di Menes. MA dengan kurikulum satuan pendidikan masih klasikal, tradisional dan tidak berkelas kelas, pembelajaran Pendidikan Agama Islam mendapat ruang yang luas karena

dikembangkan di Pondok, langgar kemudian melembaga menjadi pondok pesantren.

Apalagi MA sebagai organisasi keagamaan di Banten yang memperkenalkan sistem madrasah, memasukan mata pelajaran sekuler, madrasah khusus untuk perempuan dan pendidikan bahasa Arab. Madrasah Arabiah (Sekolah Arab) yang khusus memberi pelajaran bahasa Arab, untuk itu didatangkan seorang guru dari Salatiga yaitu KH. Humaedi disamping itu beberapa pemuda dikirim ke Jakarta (sekolah *Jami'atul Khaer*) untuk menjadi calon-calon guru. Sedangkan dalam mempelajari ilmu Falak didatangkan pula guru dari Pekalongan (KH. Syabrawi dan diadakan kursus ilmu falak bagi guru-guru Mathla'ul Anwar). Keberadaan MA yang demikian penting, menyebabkan pemerintah senantiasa menaruh perhatian yang begitu besar terhadap lembaga pendidikan ini, misalnya dengan terbentuknya Universitas MA (UNMA) pada 2001.

Lembaga pendidikan secara tidak langsung mampu menghadirkan perkembangan Islam melalui dakwah, praktik sosial dan keagamaan di antaranya, pesantren merupakan madrasah pertama dengan pengajian dan pengkajian klasikal dilakukan di sore hari di rumah seorang kiai dengan metode sorogan dan halaqoh serta menggunakan referensi kitab kuning. Adapun Madrasah, dari setingkat SD (MI), SMP (MTs) hingga SMA (MA), MA memberikan penguatan pada kelembagaan organisasi dengan peningkatan dan pembangunan bidang sosial keagamaan dan kurikulum madrasah MA lebih dari 70 persen pelajaran agama Islam, seiring dengan perkembangan kemudian disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sedangkan sekolah MA merupakan lembaga yang lebih banyak mengajarkan pengetahuan-

pengetahuan umum ketimbang pengetahuan agama, sama halnya dengan sekolah umum yang lain dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Adanya lembaga pendidikan di pesantren sebagai bagian dari dakwah dalam mempertahankan akidah dan penyebaran Islam, dengan pemahaman agama yang luas serta modal dasar dalam mengembangkan pendidikan agama sekalipun pesantren sejak awal tidak menggunakan kurikulum dan kelas serta fasilitas-fasilitas seperti madrasah dan sekolah dan sumber referensinya pun berasal dari kitab-kitab kuning. Berbeda sekali dengan madrasah dan sekolah mengalami perkembangan pesat dengan perubahan dan penambahan kurikulum, dengan sistem kelas, manajemen yang baik serta fasilitas yang memadai, madrasah dan sekolah pendidikan yang mengikuti sistem pendidikan modern yang menjadi cikal bakal pendidikan dengan sistem modern.

Kebijakan pendidikan disertai dengan tujuan untuk memajukan pendidikan terlihat dari kurikulum yang diajarkan di lembaga tersebut, tentu saja memiliki keunggulan dan ciri khas, termasuk MA dengan tambahan mata pelajaran bahasa Indonesia, Sejarah Dunia, Geografi dan Ilmu Alam, Aljabar, Ilmu Hayat, Sejarah Tata Negara, Ilmu Jiwa, bahasa Inggris sekalipun bukan hal yang baru, namun paling tidak ini menunjukkan bahwa dengan kurikulum pengetahuan umum memberikan dampak besar terhadap siswa madrasah agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum lainnya.

Namun setelah adanya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri) sehingga diperlukan penyempurnaan kurikulum madrasah, regulasi tersebut merupakan langkah yang dianggap paling esensial dalam mereliasasikan SKB tiga menteri. Persamaan status

madrasah dengan sekolah tidak hanya tampak dalam struktur kelembagaan, tetapi dalam struktur mata pelajaran yang mengakomodasikan secara penuh kurikulum sekolah, sehingga implikasi tersebut pada aspek lembaga. Madrasah yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional, telah berubah dan membuka peluang bagi kemungkinan siswa-siswa madrasah memasuki wilayah pembelajaran pada sector yang modern. Lebih dari itu madrasah juga telah mendapat pengakuan yang lebih intens karena bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan kepada Departemen Agama.

Dari aspek kurikulum, dapat diakui dan sejajar dengan sekolah umum, maka komposisi kurikulum madrasah harus sama dengan sekolah, berisi mata pelajaran dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Efeknya adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Dari aspek siswa, ijazah siswa madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, dan lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih atas. Sedangkan dari aspek masyarakat, menghentikan reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi kependidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam atas dasar semangat pembaharuan di kalangan umat Islam. Tentunya semua ini karena madrasah adalah wujud nyata dari partisipasi masyarakat (*communnity participation*) yang peduli pada nasib pendidikan bagi anak bangsanya.

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dititikberatkan pada penguatan lembaga pendidikan yang

dikembangkan oleh organisasi keagamaan MA dalam rangka menyelesaikan konflik dan percekocokan internal yang bergumul dan bernuansa politis, yang sebelum adanya SKB 3 Menteri pembelajaran agama memiliki porsi lebih banyak ketimbang pendidikan umum, akibatnya kebijakan pemerintah berimplikasi pada pendidikan yang dikelola oleh MA, sekalipun pendidikan Islam berada pada pengelolaan yang dijalankan di satu sisi tradisionalis, modernitas bahkan fundamentalisme, maka dengan demikian MA terus melakukan strategi yang ditempuh dan dikembangkan sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada peningkatan pendidikan, di antaranya :

Pertama, Madrasah Pusat mengadakan pembelajaran sembilan tahun untuk murid laki-laki, sedangkan untuk madrasah putri menyediakan pembelajaran enam tahun, akibat perselisihan internal di dalam Mathla'ul Anwar, hak madrasah untuk cabang dibatasi, yaitu hanya enam tahun masa pembelajaran. *Kedua*, peningkatan peran *Majlis Fatwa Watablig*, terutama tokoh penting dalam menginternalisasi nilai-nilai agama menjelma sebuah kebijakan yang harus diikuti oleh lembaga pendidikan yang ada di MA termasuk pendidikan pesantren, madrasah dan sekolah.

Ketiga, pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, kementerian agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi di bidang pendidikan agama Islam. *Keempat*, peningkatan kegiatan keagamaan yang melibatkan kader, mahasiswa siswa dan santri dalam upaya menyebarkan syi'ar Islam melalui dakwah dan praktik keagamaan. *Kelima*, peningkatan kapasitas ulama, guru agama, dan tokoh agama dalam setiap pemberian pesan, nasehat serta pembinaan kepada santri,

siswa dan anak-anak yang sedang belajar untuk terus melanjutkan perjuangan sebagai generasi emas di masa yang akan datang.

Keenam, penguatan peran pesantren, madrasah dan sekolah dalam upaya mengembangkan pendidikan agama Islam sebagai bentuk sosialisasi informasi dan komunikasi di lingkungan masyarakat. *Ketujuh*, penguatan kualitas dan frekuensi media dakwah dan pendidikan dengan memanfaatkan jaringan baik media masa ataupun elektronik, baik lembaga keagamaan ataupun lembaga pendidikan lainnya. *Kedelapan*, peningkatan pemahaman keagamaan melalui diskusi dan kajian rutin dalam rangka memecahkan masalah dan mencari solusi.

Sedangkan upaya yang dilakukan MA dalam mengembangkan lembaga untuk mewujudkan peningkatan pendidikan, di antaranya:

Pertama. Pengembangan Kurikulum. Mathla'ul Anwar mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal keagamaan maupun umum. Kurikulum yang dikembangkan Mathla'ul Anwar bertujuan untuk memberikan pendidikan yang bermutu dan dapat membantu para siswa untuk menghadapi tantangan masa depan.

Kedua. Kerjasama dengan Pihak Eksternal. Mathla'ul Anwar menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat. Kerjasama ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dana, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pengembangan lembaga pendidikan.

Ketiga. Rekrutmen guru yang berkualitas. Mathla'ul Anwar melakukan rekrutmen guru yang berkualitas dan berpengalaman. Guru-guru yang direkrut harus memiliki latar belakang pendidikan dan

keagamaan yang memadai, serta memiliki kemampuan untuk mengajarkan materi dengan baik dan efektif.

Keempat. Penggunaan Teknologi Pendidikan. Mathla'ul Anwar menggunakan teknologi pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran, seperti menggunakan multimedia, internet, dan perangkat lunak pendidikan. Penggunaan teknologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempermudah akses siswa terhadap informasi.

Kelima. Evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan: Mathla'ul Anwar melakukan evaluasi secara teratur untuk mengevaluasi kualitas pendidikan yang diberikan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Mathla'ul Anwar juga melakukan program pelatihan untuk guru dan staf untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Keenam. Pembangunan Infrastruktur. Mathla'ul Anwar melakukan pembangunan infrastruktur, seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan memberikan sarana dan prasarana yang memadai bagi para siswa.

Dalam mengembangkan lembaga pendidikan, Mathla'ul Anwar memiliki komitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan berlandaskan ajaran Islam yang moderat dan toleran. Mathla'ul Anwar juga mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dan memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan.

5.1 Transformasi Pesantren Menuju Madrasah

Madrasah adalah pesantren formal yang di dalamnya mengajarkan kebaikan dan membiasakannya dengan ajaran dan nilai Islam sehingga

menjadi *rahmatan lil alamin*. Sesungguhnya, MA dengan keberadaan pendidikan pesantren dan madrasah di zaman kolonial dengan sistem Barat diperkenalkan sampai ke lapisan golongan bawah, yang sebelumnya hanya dinikmati secara eksklusif oleh kalangan menengah, namun MA sejak awal berdirinya, telah menjadi dasar dan tujuan lembaga pendidikan Islam, bahwa guru agama menjadi bagian terpenting dalam menebarkan pesan Rosul baik melalui risalah dakwah maupun pendidikan dengan praktik keagamaan dengan penuh kesadaran, tidak pernah memberi pengetahuan kepada siswa untuk menjadi eksklusivisme akibat dari dialog dengan siswa dan mendiskusikan isu-isu keagamaan diskursif di madrasah ataupun di sekolah.

Pertumbuhan sekolah berlabelkan Islam oleh pemerintah Belanda, sekalipun dianggap liar karena menggunakan sistem pendidikan Islam, di Banten pada masa itu, seharusnya tidak lagi memaksakan ideologi eksklusif kepada siswa, yang jatuh ke dalam perangkap intoleransi dan menggunakan ekspresi radikal. Dengan sistem pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang dikembangkan di madrasah, setidaknya kiai atau guru agama menjadi agen perubahan dalam menerima perkembangan zaman, memperluas dan memperdalam ilmu Islam adalah bentuk modernisasi pendidikan yang sebenarnya menuju perbaikan.

Selain mendirikan madrasah baru, banyaknya cendekiawan muda yang ikut terlibat dengan mengadopsi sistem pendidikan madrasah. Apalagi lembaga pendidikan Islam modern dalam bentuk *madrasah* merupakan tiga gerakan yang diprioritaskan oleh MA terutama dalam pelayanan pendidikan harus optimal.

Pesantren sejak awal berdirinya menjadi sistem madrasah, mengajarkan pendidikan Islam untuk terus disebar dan dilakukan dengan kurikulum yang masih tetap memegang kaidah menerima hal yang baru namun tidak meninggalkan yang lama, sehingga akhirnya kiai-kiai pimpinan MA dapat berpikir dan berwawasan luas, tidak mengurung diri dalam satu pendapat seorang ulama saja.

Pesantren sebagai produk dan warisan ulama sekaligus pelopor pendidikan pertama yang mengajarkan keislaman kepada santrinya, dan ini telah dilakukan oleh Moh. Sholeh yang menjadi sistem madrasah dilanjutkan oleh Ki Mas Abdurahman yang dibantu oleh kiai-kiai lainnya, untuk terus mengembangkan kepesantrenan dengan pembelajaran sistem madrasah. Pembelajaran pesantren digabungkan dengan sistem madrasah kemudian dilanjutkan kepada pembelajaran madrasah dengan berbasis pesantren ini yang terus dilakukan, sebagaimana warisan ampuh dari para ulama dan pendiri MA.

Transformasi pesantren menuju madrasah di Mathla'ul Anwar terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih terstruktur dan terorganisir. Berdasarkan analisis dari hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa tahapan transformasi pesantren menuju madrasah di Mathla'ul Anwar diantaranya:

Pertama. Tahap Pesantren Tradisional. Pada awal berdirinya, Mathla'ul Anwar masih mengadopsi sistem pesantren tradisional yang fokus pada pengajaran ilmu agama Islam dan dilaksanakan di dalam pondok pesantren. Pendidikan yang diberikan masih bersifat informal dan lebih menekankan pada pembentukan karakter dan moral siswa.

Kedua. Tahap Madrasah Modern. Pada tahun 1930-an, Mathla'ul Anwar mulai mengadopsi sistem pendidikan formal dengan membuka madrasah modern yang mengajarkan materi-materi ilmu umum seperti matematika, fisika, kimia, dan bahasa asing. Madrasah modern ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang lebih terstruktur dan terorganisir.

Ketiga. Tahap Pendidikan Formal. Pada tahun 1950-an, Mathla'ul Anwar telah berkembang menjadi lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, Mathla'ul Anwar juga membuka program pendidikan untuk orang dewasa, seperti kursus bahasa dan keterampilan kerja.

Keempat. Tahap Integrasi Pendidikan Agama dan Umum. Pada tahun 1980-an, Mathla'ul Anwar mengintegrasikan pendidikan agama dan umum dalam kurikulum yang disusun. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesenjangan antara ilmu agama dan umum, sehingga siswa dapat memiliki pengetahuan yang seimbang dalam kedua bidang tersebut.

Kelima. Tahap Pendidikan Profesional. Pada tahun 2000-an, Mathla'ul Anwar mulai menyelenggarakan pendidikan profesional, seperti pendidikan kedokteran, kebidanan, dan keperawatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga profesional yang terampil dan berkualitas.

Transformasi pesantren menuju madrasah di Mathla'ul Anwar dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam perkembangannya, Mathla'ul Anwar terus berupaya

untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan masa depan, sekalipun pesantren bertransformasi menjadi madrasah namun tetap pembelajaran pesantren masih berlangsung baik di pesantren itu sendiri maupun di madrasah.

5.2 Madrasah sebagai Penguatan Pendidikan Islam

Madrasah MA sepenuhnya menggunakan kurikulum pemerintah yang diakui secara hukum, sehingga keberadaan madrasah apalagi pesantren dianggap kurang penting dibanding sekolah-sekolah. Dalam konteks perkembangan madrasah, perubahan karakter tersebut, menjadikan pendidikan Islam MA mulai melakukan perbandingan dan memilih secara terbuka untuk menentukan jalur pendidikan seiring efek globalisasi dan urbanisasi di mana semua orang dapat menentukan sekolah berdasarkan selera dan keinginannya.

Penerapan sistem pendidikan Nasional memecahkan satuan pendidikan yang di MA, khususnya pendidikan Islam dipersempit dengan adanya keputusan tiga menteri. MA dengan sikap akomodatif terkait dengan reformasi pendidikan Agama Islam menyerukan dan menyuarakan dengan melakukan program pendidikan secara komprehensif terhadap lembaga pendidikan khususnya pesantren, madrasah dan sekolah bahwa setiap santri atau siswa yang berkarakter adalah cerminan manusia dari kualitas lembaga pendidikan yang tertuang dalam ke-MA-an. Pendidikan karakter yang menjadi visi dan misi pendidikan MA merupakan kurikulum dan mata rantai praksis pendidikan dan dinamika pedagogis, merupakan upaya untuk menghidupkan kembali pedagogi ideal-spiritual lama yang tenggelam akibat dominasi positivisme, yaitu dorongan untuk mempertahankan diri

di lingkungan luar dan dorongan untuk mengembangkan diri atau belajar terus menerus untuk mencapai tujuan adanya pendidikan di madrasah.

Kurikulum harus memenuhi unsur ubudiyah, yang dititikberatkan kepada kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga dengan adanya muatan unsur ibadah secara otomatis hubungan muamalah antar manusia dan ilmu pengetahuan umum disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang ada. Dengan adanya integrasi antar lembaga, baik lembaga pendidikan dan keagamaan dapat menemukan titik temu perbedaan dengan menyelesaikan segala persoalan. Konten kurikulum berikutnya adanya pengajian sorogan kitab kuning yang rutin dan pengajian di majlis ta'lim, kegiatan dakwah, sampai kepada gerakan kebersihan, PKK, KB dan kepramukaan sebagai bentuk sosialisasi pendidikan yang akan menjadi kepentingan dan kepedulian sosial yang tidak bisa lepas dari norma-norma agama dan norma susila.

Demikian juga kurikulum harus memenuhi target yang dicapai demi tujuan pendidikan nasional dan pendidikan agama Islam di tiap-tiap tingkat pendidikan, sehingga kurikulum harus bersifat didaktis dan metodik yang tentu saja setiap pengetahuan yang diajarkan memiliki nilai manfaat dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Aktivitas pengiriman kader-kader, terutama para alumni madrasah MA pusat Menes makin gencar dilakukan pada masa kepemimpinan KH. Uwes Abubakar. Pada masa ini MA berada pada posisi yang tidak menguntungkan lantaran ada empat madrasah baru yang didirikan oleh mantan guru MA sekaligus kader yang militan MA yang kemudian mengambil alih kepemimpinan dengan cara membawa MA berposisi dengan penguasa Orba. Dengan tekanan dari luar yang

cukup kuat dan perselisihan internal yang begitu hebat mengalami kemunduran sehingga banyak lembaga yang berdiri sendiri dengan mengembangkan lembaga pendidikannya dengan tidak memakai MA, kecuali Malnu yang masih menggunakan nama MA.

MA merupakan organisasi terbesar di Banten, yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah. MA telah tersebar luas di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Keberadaan Organisasi MA saat ini sangat diterima oleh masyarakat luas terbukti, banyak yang menyekolahkan anaknya ke lembaga MA. Dakwah yang dilakukan MA melalui pendidikan sangat efektif karena hampir setiap desa memiliki lembaga pendidikan MA khususnya di Kabupaten Pandeglang.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, MA berpedoman sepenuhnya pada sistem pendidikan nasional, yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan Mathla'ul Anwar, mewujudkan secara konseptual peraturan pemerintah dan operasional yang berpedoman kepada anggaran dasar MA. Pendidikan MA telah mengalami modernisasi terbukti dengan adanya pengadopsian pelajaran umum dimulai dari peraturan pemerintah tentang pendidikan, di mana pemerintah mewajibkan semua sekolah yang telah diakui secara hukum untuk mengadopsi pelajaran umum. Namun perlu digarisbawahi bahwa masuknya mata pelajaran umum bukanlah hal yang baru, karena sebelumnya MA telah mengajar mata pelajaran umum tertentu bahkan sebelum kemerdekaan, seperti bahasa Indonesia, latihan menulis latin, aritmatika, sejarah dunia, geografi, dan banyak lagi ilmu alam. ilmu pengetahuan. terpilih. beberapa menggunakan bahasa Arab sebagai alat pengajaran. Namun, kewajiban pemerintah untuk mengajar mata pelajaran umum.

Secara tradisional, MA dikenal banyak menghasilkan lulusan yang

memiliki kemampuan berbahasa Arab sangat baik. Masuknya bahasa Inggris seolah-olah membayangkan akan adanya penambahan beban yang menumpuk bagi mereka yang mengambil pelajaran bahasa Arab sehingga kemampuan siswa dalam menyerap bahasa Arab akan berkurang. Situasi tersebut tidak menjadi keengganan internal dan ketidakpastian karena lambatnya pemerintah dalam memperbaiki peraturannya tentang posisi pelajaran agama di sekolah umum. Di sisi lain, MA mempertahankan kebijakannya untuk mengadopsi mata pelajaran umum dalam kurikulumnya, seperti yang dicontohkan dengan pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI).

Ada beberapa poin besar yang mendasar bagi pendidikan di MA yang mengacu kepada pemenuhan dan kebutuhan masyarakat di antaranya. Pertama, pendidikan MA menerapkan kurikulum Nasional. Kedua, satuan pendidikan di bawah binaan Depdiknas melaksanakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Depdiknas dan satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama menerapkan Kurikulum Nasional yang diberikan oleh Kementerian Agama. Ketiga, pendidikan di MA dapat mengembangkan Kurikulum Nasional secara kreatif sesuai kebutuhan dan kemampuan. Keempat, pendidikan di MA menambahkan kurikulum *Ke-*Mathla'ul Anwar*-an* (Ke-MA-an) sebagai konten khas lembaga. Kelima, satuan Pendidikan MA dapat menetapkan *bankmark* (standar kemampuan) untuk pendidikan Agama. Keenam, muatan lokal kurikulum di MA dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan pendidikan yang diselenggarakan.

Dalam pendidikan pra-dasar, yang pendidikan diperuntukkan untuk anak TK/ RA, pendidikan dasar setingkat anak SD/ MI, sedangkan pendidikan tingkat menengah pertama dan atas, setingkat

SMP/MTs dan SMA/Madrasah Aliyah/ SMK, dalam pembelajaran mulai dari tingkat dasar sampai kepada perguruan tinggi harus mencakup kepada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau pendidikan, sedangkan di tingkat perguruan tinggi MA menerapkan kurikulum pendidikan dengan kerangka dan struktur kurikulum yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Kurikulum pendidikan tinggi hanya diwajibkan memuat tiga hal, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa, program pengajaran yang dilaksanakan secara sadar dan konseptual untuk mempersiapkan peserta didik agar beriman, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan.

Ada beberapa hal, terkait dengan kurikulum nasional yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud yang wajib diimplementasikan di madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah, namun di MA sendiri tentang materi ke-*Mathla'ul Anwar*-an merupakan suatu hal yang harus diwajibkan tidak lain bertujuan agar siswa yang belajar di lembaga pendidikan MA mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan keislaman serta memahami, menghayati organisasi dan perjuangan MA agar menjadi bagian dari masyarakat yang Pancasilais, taqwa kepada Allah SWT, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap dan terampil serta berkepribadian Indonesia.

Adapun fungsi dari materi Ke-*Mathla'ul Anwar*-an dapat diwujudkan oleh siswa yang belajar di MA sehingga dalam

mempelajarinya akan mendapatkan beberapa hal di antaranya: Pertama, pengembangan, dengan pengembangan dapat meningkatkan keberhasilan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Kedua, penyaluran yaitu menyalurkan bakat peserta didik khususnya di bidang agama agar dapat berkembang secara optimal sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ketiga, penyesuaian, yaitu mengupayakan agar siswa mampu beradaptasi dengan lingkungan yang islami. Keempat, perbaikan, yaitu mengoreksi kekurangan dan kelemahan peserta didik dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Keenam, pengajaran yaitu menyampaikan penyampaian *Dienul Islam* dan sejarah Mathla'ul Anwar. Ketujuh, loyalitas, yaitu menumbuhkan rasa loyalitas terhadap pergerakan dan perjuangan Mathla'ul Anwar.

Madrasah MA salah satu lembaga pendidikan Islam yang memainkan peran penting dalam penguatan pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah ini telah memberikan kontribusi besar dalam memajukan pendidikan Islam dan memperkuat keberadaan agama Islam di masyarakat.

Ada beberapa cara Madrasah Mathla'ul Anwar sebagai penguatan pendidikan Islam, di antaranya :

Pertama. Menyediakan pendidikan Islam berkualitas. Madrasah Mathla'ul Anwar menyediakan pendidikan Islam yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan zaman. Lembaga ini menawarkan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dengan fokus pada pengajaran ilmu agama Islam yang akurat dan

benar.

Kedua. Mengintegrasikan pendidikan agama dan umum. Madrasah Mathla'ul Anwar juga mengintegrasikan pendidikan agama dan umum dalam kurikulum yang disusun. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesenjangan antara ilmu agama dan umum, sehingga siswa dapat memiliki pengetahuan yang seimbang dalam kedua bidang tersebut.

Ketiga. Memperkuat pendidikan Islam di masyarakat. Madrasah Mathla'ul Anwar turut berkontribusi dalam memperkuat keberadaan agama Islam di masyarakat melalui pengajaran yang diberikan dan pembinaan kepada siswa. Lembaga ini juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan di masyarakat, seperti pengajian dan acara amal.

Keempat. Memberikan contoh bagi lembaga pendidikan lain. Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka, Madrasah Mathla'ul Anwar memberikan contoh yang baik bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam hal penguatan pendidikan Islam. Dengan memperlihatkan kualitas dan keberhasilannya, lembaga ini dapat memotivasi lembaga pendidikan Islam lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Kelima. Menyebarkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran. Madrasah Mathla'ul Anwar mengajarkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, yang mampu menyatukan berbagai kalangan dalam kehidupan beragama. Hal ini membantu memperkuat keberadaan agama Islam di masyarakat dan memperkuat toleransi antarumat beragama.

Dengan segala upaya yang dilakukan MA dalam memajukan pendidikan Islam dan memperkuat keberadaan agama Islam di

masyarakat, madrasah Mathla'ul Anwar telah menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang sangat penting di Indonesia, umumnya dan Banten, khususnya.

5.3 Sekolah sebagai Reformasi Pendidikan Islam

MA dengan sistem madrasah melalui pembelajaran di kelas (9 kelas) mengalami perubahan dengan adanya madrasah yang dirancang untuk menjadi sekolah Islam modern yang mengajarkan pendidikan agama dan umum. MA melalui tugas dan fungsinya sebagai lembaga sosial dan keagamaan, pertama kali yang dilakukan adalah membentuk dan mengembangkan karakter dan potensi peserta didik, kemudian memelihara budaya itu yang dianggap layak bagi dirinya dan masyarakat, mengapresiasi budaya yang akan dikembangkan sesuai dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat. Kedua, melakukan interaksi antara budaya dan potensi pribadi sebagai bagian dari persiapan untuk membangun karakter sosial yang beradab.

Adanya peraturan yang berbeda mengenai kedudukan pelajaran agama dan pelajaran umum menyebabkan munculnya kecurigaan di kalangan guru muslim tentang agenda tersembunyi sekularisasi masyarakat Indonesia. Posisinya sebagai mata pelajaran pilihan studi agama telah memicu kebencian yang meluas di kalangan umat Islam setelah gagal menerapkan Islam sebagai ideologi dasar negara, meskipun umat Islam adalah bagian besar dari produk Indonesia. Pada saat yang sama, MA menghadapi perpecahan internal yang meluas telah merusak stabilitas pendidikan keagamaan. Pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh K.H. Mas Abdurahman punya dampak yang luar biasa.

Dengan didirikannya madrasah oleh Ki Mas Abdurahman tidak dapat dipungkiri membawa manfaat bagi masyarakat lokal, khususnya

mampu membasmi kebodohan dan juga mengubah masyarakat dari lembah kemalasan menjadi masyarakat yang produktif, serta menjadi pribadi yang siap menjadi pemimpin di segala bidang. Hal ini terbukti bahwa lingkungan sekitar Menes menjadi kiblat pendidikan di Kabupaten Pandeglang, maka tidak menjadi hal aneh jika muktamar Nahdatul Ulama (NU) digelar di Menes dan diterima masyarakat sekaligus bentuk integrasi pendidikan dan gerakan dakwah keagamaan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sampai saat ini kondisi pendidikan Islam melalui pesantren dan madrasah menjadi pendidikan Islam modern Mathla'ul Anwar, karena puncak dari upaya modernisasi telah dimulai secara sistematis pendidikan dengan penyelenggaraan sekolah yang mendorong terwujudnya MA menjadi lembaga Islam yang modern. Apalagi hal ini didukung pemerintah, semenjak kepemimpinan Irsyad Djuwaeli pada masa kepemimpinannya, MA mengeluarkan kebijakan progresif dan berani, yaitu selain menerima Pancasila sebagai azas tunggal bagi kehidupan seluruh partai dan ormas-ormas keagamaan yang ada di Indonesia, juga memperkuat kewajiban untuk semua anggota MA untuk mendukung partai Golkar. Suatu kebijakan politis yang hampir memantapkan kembali pertengkar teologis di tubuh Mathla'ul Anwar.

MA pada periode dengan era reformasinya telah banyak mewujudkan kepedulian sosial dan pendidikan tersebut dengan cara menampung banyak santri yang berasal dari kalangan masyarakat yang tidak mampu. Para santri tersebut tidak dikenakan biaya pendidikan, tinggal di beberapa pesantren yang diasuh oleh para ulama MA dan pada saat yang bersamaan pesantren yang memiliki madrasah dan sekolah

dengan *boarding school*nya yang terus dikembangkan oleh MA, perguruan pusat sebagai pusat pendidikan di MA.

Gerakan MA, terutama dalam bidang sosial tidak mengalami perkembangan yang signifikan seperti halnya dalam bidang pendidikan. Upaya pembenahan gerakan MA dalam bidang sosial baru terlihat pada akhir tahun 2017 dengan lahirnya gagasan mendirikan *MA Peduli* yang kemudian direalisasikan dengan terbentuknya *MA Care* pada tahun 2018.

Dengan berdirinya Lembaga Pendidikan MA dan tersebar ke setiap daerah, membuktikan bahwa MA telah memberikan kontribusi yang nyata dalam memajukan pendidikan di Indonesia. MA juga memiliki peran sosial yang tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat sekitar Banten.

Tentunya peran-peran tersebut sangat membantu negara Indonesia dalam memajukan peradabannya dan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. MA merupakan simbol kekuatan agama Islam dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang berkualitas. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang disosialisasikan MA telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Menes Pandeglang menuju kehidupan yang lebih baik dalam hal agama dan negara. Perbedaan antara masyarakat sebelum dan sebelum berdirinya Organisasi MA terlihat jelas berupa ajakan untuk membantu masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara komprehensif.

Ditambah dengan sarana prasarana yang memadai dan lengkap dengan adanya *boarding school* adalah sistem sekolah dengan asrama,

dimana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Saat ini, banyak orang tua yang cenderung menyekolahkan anaknya pada sekolah yang berasrama. Alasannya adalah ingin anak-anaknya lebih mandiri dan terbentuk karakternya dengan lebih baik terutama pesantren sebagai asrama sekolah.

Dengan standar mutu pendidikan yang dibangun oleh MA melalui pesantren sebagai asrama madrasah dan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk ideologi keagamaan yang dibuktikan pada tahap pengintegrasian orientasi, rasionalisasi dan legitimasi yang ketiganya saling berkaitan. Reformasi pendidikan Islam di sekolah MA merupakan pengintegrasian orientasi dengan rumusan pemahaman agama yang diberikan dalam berbagai bahan ajar atau kurikulum yang digunakan.

MA salah satu lembaga pendidikan Islam yang sangat peduli dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh MA dalam reformasi pendidikan Islam adalah dengan mengembangkan sekolah sebagai sarana untuk memberikan pendidikan Islam yang berkualitas kepada masyarakat.

Ada beberapa cara Mathla'ul Anwar dalam mengembangkan sekolah sebagai reformasi pendidikan Islam, diantaranya :

Pertama. Menyediakan pendidikan berkualitas. MA menyediakan pendidikan berkualitas baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non-formal. Lembaga ini menawarkan program pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, dengan fokus pada pengajaran agama Islam yang akurat dan benar. Selain itu, MA juga menyediakan berbagai program pelatihan dan kursus bagi masyarakat umum yang ingin meningkatkan pengetahuan dalam bidang agama Islam.

Kedua. Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. MA selalu berusaha untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Lembaga ini mengintegrasikan pendidikan agama dan umum dalam kurikulum yang disusun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa memiliki pengetahuan yang seimbang dalam kedua bidang tersebut.

Ketiga. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga pendidikan lain. MA aktif menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, baik lembaga pendidikan Islam maupun non-Islam. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Dengan cara ini, Mathla'ul Anwar mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Keempat. Mengembangkan pendidikan keterampilan. Selain fokus pada pendidikan agama, MA juga mengembangkan program pendidikan keterampilan. Lembaga ini menyadari bahwa pendidikan keterampilan juga sangat penting dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup mereka. Program pendidikan keterampilan yang disediakan oleh MA antara lain pelatihan kewirausahaan, bahasa Inggris, dan teknologi.

Kelima. Mengedepankan pemahaman Islam yang moderat dan toleran. MA mengedepankan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, yang mampu menyatukan berbagai kalangan dalam kehidupan beragama. Hal ini membantu memperkuat keberadaan agama Islam di masyarakat dan memperkuat toleransi antarumat beragama.

MA telah memberikan kontribusi besar dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia sehingga MA terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Mengembangkan sekolah sebuah upaya

yang melibatkan berbagai strategi dan langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan yang diinginkan, disamping merumuskan visi dan misi yang jelas, memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pengembangan sekolah tentu saja melibatkan seluruh stakeholder, termasuk guru, staf, siswa, orang tua, dan komunitas lokal.

Fokus pada peningkatan kualitas pengajaran adalah langkah penting dalam pengembangan sekolah. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru, memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengalaman antar guru, serta menerapkan metode pengajaran yang inovatif dan efektif.